

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)**

(Studi Kasus Kabupaten Mojokerto)

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh :

Mia Retno Prahesti

105020107111014



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2014

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
(STUDI KASUS KABUPATEN MOJOKERTO)**

Yang disusun oleh :

Nama : Mia Retno Prahesti
NIM : 105020107111014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2014

Malang, 24 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

Eddy Suprpto, SE.,ME.

NIP. 19580709 198603 1 002

**Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
(UKM)
(Studi Kasus Kabupaten Mojokerto)**

Mia Retno Prahesti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: m.prahesti@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu jumlah Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat tiap tahunnya. Namun Usaha Kecil Menengah dihadapkan berbagai permasalahan yang bersumber dari kelemahan Usaha Kecil Menengah itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan dari pemerintah daerah agar Usaha Kecil Menengah tersebut menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan pada setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah seperti penciptaan iklim usaha yang kondusif dan penguatan potensi yang dimiliki pengusaha dan pengrajin dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil Menengah, menjadikan usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggikan berkembang secara berkelanjutan pada setiap tahunnya.

Kata Kunci: Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang terletak cukup strategis, 50 km arah barat ibukota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Kabupaten Mojokerto juga termasuk dalam Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Daerah-daerah tersebut merupakan kawasan yang menyangga Kota Surabaya . Dari data UKM unggulan per 30 juni 2013 yang dikutip dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan. Melihat kondisi ini maka pengembangan UKM menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah	677	838	1023	1255	1586

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto

Dapat dilihat kondisi UKM pada Kabupaten Mojokerto pada tabel 1, dimana dari tahun 2009 – 2013 jumlah UKM di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat tiap tahunnya. Maka tidak diragukan lagi peranannya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat kelompok rendah dan telah banyak menyerap tenaga kerja.

Melihat keberadaan UKM di Kabupaten Mojokerto yang semakin meningkat tiap tahunnya, sektor UKM juga mengalami berbagai permasalahan yang pada umumnya bersumber dari kelemahan yang terjadi dalam diri UKM. Menurut Kuncoro (2003) permasalahan yang dihadapi UKM antara lain kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalan terhadap sumber-sumber permodalan, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen SDM,

keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan, pembinaan yang telah dilaksanakan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM).

Beberapa kendala sebagaimana diatas inilah yang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM agar Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Sehingga keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) perlu untuk diberdayakan. Peran serta pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) sangatlah diperlukan agar usaha kecil menengah (UKM) ini dapat berkembang lebih pesat. Pemberdayaan ini ditujukan agar sektor ini dapat berperan sebagai sumber penghasilan yang cukup bagi pemilik usaha dan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya. Karena jika dalam hal ini ditangani secara sungguh-sungguh, usaha kecil menengah (UKM) ini dapat menjadi sumber penghasilan atau pendapatan yang potensial.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) pada dasarnya ditekankan pada upaya untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, melestarikan seni budaya, modernisasi masyarakat desa, memperkuat struktur industridan meningkatkan ekspor nasional. Dengan adanya pengembangan ini, diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan nantinya diharapkan dapat berkembangnya usaha kecil menengah (UKM) kearah yang lebih maju dan mandiri.

Tahapan Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan menurut Kartasmita (1996, h. 24) dilakukan melalui 3 arah, yaitu :

1. Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah usaha untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Strategi Pemberdayaan

Berbagai pendekatan yang mungkin dapat diterapkan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang antara lain :

1. Upaya pemberdayaan yang terarah atau pemihakan kepada yang lemah
2. Pendekatan kelompok untuk memudahkan dalam pemecahan masalah secara bersama-sama
3. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping (pendamping, lokal, teknis, dan khusus). Yang berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta membentuk kelompok, mencari solusi atas masalah yang dihadapi (Kartasmita, 1996, h. 107)

Pemberdayaan atau *empowerment* dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. The Welfare State
Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

2. The Development Approach
Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.
3. The Empowerment Approach
Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan serta melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pemberdayaan yang baik memerlukan suatu strategi yang baik pula. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya selama proses kegiatan berlangsung materi-materi yang akan disampaikan dapat diterima secara utuh dan memberikan respon positif bagi para pengusaha dalam rangka mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Parsons *et.al.* dalam Suharto (2006, h.66) menyatakan bahwa pada umumnya proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1,2,3,4) menjelaskan tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar, yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki kriteria dalam mencapai suatu usaha. Kriteria – kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain :

1. Bahan baku mudah diperoleh;
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi;
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun;
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak;
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal / domestic dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor;
6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat;
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan.

Masalah – Masalah yang Dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Masalah yang terjadi dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) juga harus selalu diperhatikan, karena mengingat usaha kecil dan menengah (UKM) ini dapat membantu meningkatkan perekonomian. Berikut ini, masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), antara lain :

1. Pengetahuan yang kurang dalam menciptakan industri kecil dan menengah;
2. Kemampuan / skill yang kurang;
3. Pemasaran produk yang kurang luas;
4. Kesulitan dalam mendapatkan perizinan usaha;
5. Keterbatasan dan modal

6. Permintaan pasar yang menurun akibat krisis global;
7. Penggunaan teknologi yang kurang modern.

Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menjalankan usaha pasti ada kelebihan dan kelemahan yang dihadapi. Di bawah ini terdapat kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh UKM antara lain :

a. Kelebihan

Kelebihan dan daya tarik yang dimiliki usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain :

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan dan menjalankan semua fungsi manajerial seperti marketing, finansial dan administrasi;
2. Dalam pengelolaannya tidak memerlukan manajerial yang handal;
3. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru;
4. Resiko menjadi beban pemilik;
5. Bebas menentukan harga produksi barang dan jasa;
6. Prosedur hukumnya;
7. Pajak relatif ringan karena yang dikenakan pajak adalah pribadi atau pengusaha bukan perusahaan;
8. Mudah dalam proses pendirian;
9. Mudah dibubarkan;
10. Pemilik mengelola secara mandiri serta bebas waktu;
11. Pemilik menerima seluruh laba;
12. Umumnya mempunyai kemampuan *survive*;
13. Diversifikasi terbuka luas, sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa terjadi melalui kreativitas pengelola;
14. Tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya tidak terlalu mahal;
15. Mempunyai ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengusaha kecil lainnya.

b. Kelemahan

Kelemahan usaha kecil dan menengah (UKM) dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern antara lain :

1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam usaha kecil dan menengah (UKM). Di bawah ini terdapat faktor-faktor intern UKM yang meliputi :

- a. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak memenuhi ketentuan pembukuan yang standar
- b. Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan bekerja tidak sesuai dengan jam kerja standar
- c. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja, karena tidak ada perencanaan kas
- d. Persediaan barang terlalu banyak, sehingga beberapa jenis barang menjadi kurang laku
- e. Sering terjadi *miss management* dan ketidakpedulian pengelolaan prinsip-prinsip manajerial
- f. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada, atau belum dirumuskan.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar usaha kecil dan menengah (UKM). Di bawah ini terdapat faktor-faktor ekstern UKM, antara lain :

- a. Resiko dan hutang-hutang pada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik
- b. Kekurangan informasi bisnis, hanya mengenai intuisi bisnis dan ambisi pengelola, serta kurangnya promosi
- c. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang tunai.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 26) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang bertujuan untuk menguji

hipotesis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Selain itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan atau melukiskan fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara sistematis, faktual dan akurat.

Sumber Data dan Penentuan Informan

Sumber data disini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber informan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto, alasan pemilihan tersebut dikarenakan informan merupakan pengambil kebijakan terkait dengan upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Mojokerto dan informan kedua yaitu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Mojokerto dengan pertimbangan bahwa informan merasakan secara langsung fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan UKM.

Metode Pengumpulan Data, Analisis Data dan Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Milles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan derajat kepercayaan, ketergantungan, kepastian.

D. PEMBAHASAN

Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu komoditi potensial khas Mojokerto. Usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto sebagian besar masih bersifat tradisional dan produksinya masih menggunakan alat – alat sederhana. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis, sifat dan tata penghidupan, kepercayaan dan adat istiadat, keadaan alam sekitarnya, dan keadaan kontak atau hubungan antar daerah industri yang bersangkutan.

Potensi usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto kemudian didukung oleh adanya tradisi warisan budaya nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun serta tersedianya jumlah tenaga kerja (pengrajin) yang ada, baik dari hasil pengalamannya bekerja maupun dari kursus – kursus. Sehingga mampu menggerakkan komponen usaha untuk industri. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Ibu Rita yang mengatakan bahwa :

“Kabupaten Mojokerto kaya akan tradisi warisan budaya .Dan dalam kaitannya dengan keberadaan industri kecil salah satunya adalah industri makanan khas. Industri ini umumnya bersifat industri kecil rumahan (*home industry*) dan bersifat turun temurun. Selain itu industri kerajinan juga merupakan industri andalan yang mampu menembus ekspor yaitu industri sepatu di Desa Sooko Kecamatan Sooko. Sebagian besar usaha kecil dan menengah (UKM) Kabupaten Mojokerto mengandalkan keterampilan, sehingga keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja ini sudah selayaknya dikembangkan dan dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto” (wawancara hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, pukul 11.00 WIB, di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM).

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa :

“Posisi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto saat ini adalah mengupayakan bagaimana posisi sentra – sentra industri kecil dan UKM ini bisa dilestarikan. Adapun langkah-langkahnya adalah baik pada tingkat usahanya maupun pada tingkat pengrajin perlu untuk diberdayakan kembali.” (wawancara hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, pukul 11.00 WIB, di Dinas Koperasi dan UMKM).

Adapun penyebaran potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2: **Penyebaran Potensi UKM di Kabupaten Mojokerto**

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Lokasi / Kecamatan
1	Kacang Mente	23	Ngoro
2	Krupuk Rambak	23	Bangsar
3	Rengginang	30	Mojosari

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Lokasi / Kecamatan
4	Samiler	106	Gondang
5	Tahu	34	Puri
6	Tape Ketan Hitam	78	Gondang
7	Tape Singkong	76	Ngoro
8	Tempe	44	Puri, Dlanggu
9	Sepatu	502	Sooko, Puri, Mojoanyar
10	Sepatu Bola	31	Sooko
11	Tas dan Dompot	68	Jetis. Sooko, Pungging
12	Anyaman Bambu	86	Sooko, Dawarblandong
13	Anyaman Tikar Pandan	165	Puri
14	Cor Kuningan	104	Trowulan
15	Gerabah	23	Puri
16	Perak	113	Sooko, Kemlagi, Gedeg
17	Sapu Ijuk	60	Puri
18	Topi Bordir	20	Sooko

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur 2010

Usaha kecil dan menengah (UKM) sebagian besar masih bersifat industri perorangan, sehingga struktur organisasi dan manajemennya belum terkoodinir dengan baik dan sebagian besar usaha industri ini masih diproduksi berdasarkan pesanan. Dari potensi yang ada tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya adalah aspek sumber daya manusia, aspek produktivitas, aspek permodalan serta aspek pemasaran.

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari aspek sumber daya manusia, para pengusaha dan pengrajin usaha kecil dan menengah (UKM), sebagian besar sudah memiliki pengetahuan tentang keterampilan usaha. Untuk pendidikan formal, para pengusaha sebagian besar memiliki pendidikan pada taraf pendidikan dasar. Sedangkan para tenaga kerja rata – rata pendidikannya masih rendah serta rata – rata banyak yang masih berusia produktif.

Keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) ini perlu didorong terus agar tenaga kerja yang terserap lebih banyak dan muncul pengusaha – pengusaha baru. Disamping itu juga harus diberi peluang yang lebih besar agar dapat membantu perekonomian daerah. Dengan kata lain, rakyat banyak menjadi pemilik, pengelola dan pengguna utama kekayaan dan sumber daya ekonomi.

b. Aspek Permodalan

Pada aspek permodalan, para pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM), sebagian besar menggunakan permodalan dengan modal sendiri dan jarang yang menggunakan pinjaman perbankan. Dana yang cukup besar sangat dibutuhkan, terutama saat awal pendirian suatu usaha. Meskipun demikian sebagian besar pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) tetap menggunakan modal seadanya yang mereka miliki, dan setelah berjalan sekian lama, mereka berusaha mencari tambahan modal. Faktor ketersediaan modal usaha nampaknya merupakan kendala dalam kegiatan usaha kecil dan menengah ini.

Sesuai dengan kondisi yang ada pada pengusaha usaha kecil dan menengah yang ada sudah mapan dan memiliki permodalan yang cukup besar, tetapi ada pula para pengusaha yang omzetnya masih kecil. Hal ini dikarenakan status perekonomian masyarakat Mojokerto masih relatif lemah sehingga investasi / permodalan masih rendah.

c. Aspek Produktivitas

Untuk keperluan produksi, usaha kecil dan menengah (UKM) memerlukan bahan baku dan bahan penolong serta alat – alat produksi. Sejauh ini ketersediaan bahan baku maupun bahan penolong di Kabupaten Mojokerto dapat mencukupi kebutuhan industri. Karena sebagian besar sentra usaha kecil dan menengah (UKM) di Mojokerto adalah usaha industri pengolahan sumber daya alam lokal. Hanya sebagian kecil sentra usaha industri yang harus mendatangkan bahan dari luar Kabupaten Mojokerto. Namun hal ini tidak mengurangi niat para pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) melaksanakan kegiatan produksinya. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan usahanya terkadang keterbatasan bahan baku masih menjadi kendala, keterbatasan ini dipengaruhi pula oleh adanya keterbatasan modal, sehingga sering menjadi hambatan dalam pertumbuhan dan kelangsungan produksi.

d. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam perkembangan usaha disamping aspek produksi. Aspek pemasaran perlu dipertimbangkan dengan baik serta perlu adanya suatu

teknik tertentu agar penjualan bisa meningkat. Dalam aspek pemasaran tentunya perilaku konsumen dan pesaing juga perlu dipertimbangkan agar produk yang kita hasilkan tetap laku di pasaran. Dari aspek penjualan, umumnya pengusaha masih memiliki omzet yang masih terbatas dan modal yang dimiliki untuk memproduksi barang juga masih terbatas.

Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Strategi pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) didasarkan pada strategi pemberdayaan secara umum yaitu melalui penciptaan iklim yang mampu mendorong pengusaha untuk mengembangkan usahanya dan melalui penguatan potensi yang dimiliki pengusaha. Mengacu pada strategi dasar tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Aksesibilitas Permodalan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih lemah pada segi permodalan yang dimiliki, maka strategi yang dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan adalah melalui bantuan pinjaman kredit lunak, yaitu melalui kredit modal kerja dan investasi pada tahun 2009 – 2011 dengan jangka waktu selama 2 tahun. Program bantuan pinjaman kredit lunak bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan sistem dana bergulir serta bunga pinjaman sebesar 14% per tahun untuk tahun pertama dan 12% untuk tahun kedua. Dana pinjaman tersebut merupakan dana yang digunakan untuk bantuan dana bergulir untuk pemberdayaan bantuan usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun program pemberdayaan bantuan ini dimaksudkan untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah agar memperoleh tambahan permodalan yang dapat meningkatkan produktivitas kegiatannya.

b. Penyediaan Layanan Infrastruktur

Penyediaan layanan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, jalan raya, listrik dan air bagi kemajuan dan mobilitas perekonomian di Kabupaten Mojokerto adalah sangat penting, terutama dalam kelancaran melaksanakan proses produksi serta memasarkan hasil produksi.

c. Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perijinan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat telah menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan dengan mengupayakan terwujudnya pelayanan perijinan satu atap (one stop service) sejak tahun 2009. Hal ini semata – mata adalah untuk memberikan kemudahan persyaratan dalam memperoleh perijinan. Untuk memperlancar strategi ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Perijinan Terpadu (BPT) telah melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan harapan mampu menciptakan mekanisme pelayanan perijinan berjalan sesuai dengan prosedur pelayanan prima dalam bidang perijinan. Sehingga diharapkan adanya pelayanan yang lebih baik ini masyarakat dan pengusaha termotivasi untuk mendaftarkan ijin usahanya agar tercipta iklim usaha yang lebih kondusif, serta meningkatnya usaha perekonomian rakyat.

d. Peningkatan Aksesibilitas Kerjasama dan Kelembagaan

Untuk meningkatkan potensi usaha kecil dan menengah (UKM), Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas kerjasama dan kelembagaan dengan membentuk suatu program yang mampu mengarahkan dan menggali kemampuan serta memberdayakan mereka melalui Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) pada tahun 2010. Program ini merupakan program kemitraan yang terlembaga bagi para pelaku (*stakeholder*) daerah yang relevan serta dengan tujuan yang lebih mengacu pada pembangunan melalui usaha – usaha bersama, pembentukan konsultan pendamping, pembentukan klaster serta mampu menciptakan pola kemitraan / jejaring antar klaster usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto. Program ini diharapkan dapat meningkatkan peningkatan taraf hidup dan produktivitas yang lebih berdaya guna ekonomis tinggi serta mampu memberdayakan masyarakat industri.

e. Pembinaan dan Pengembangan Kemampuan Teknik dan Manajerial

Kualitas dan produk usaha kecil menengah (UKM) sangat terkait dengan teknik produksi serta pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia baik dari pengusaha maupun pengrajin. Demikian pula dalam memasarkan produk yang dihasilkan sangat berkaitan erat dengan kegiatan promosi dan jiwa kewirausahaan dari para pengusaha maupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memfasilitasinya.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemberdayaan UKM

Pemerintah Kabupaten Mojokerto meskipun dalam merencanakan strategi yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) sudah mempertimbangkan dengan baik faktor – faktor yang

mempengaruhinya, namun dalam pelaksanaannya hasil yang dicapai tentunya tidak terlepas dari faktor – faktor yang menghambat maupun mendukungnya. Adapun faktor – faktor yang menghambat dan mendukungnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3: **Faktor – Faktor Penghambat dan Pendukung**

FAKTOR	INTERNAL	EKSTERNAL
Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kultur masyarakat pengusaha yang masih tertutup. 2. Rendahnya kemampuan manajerial pengusaha. 3. Kurangnya ketersediaan bahan baku dari luar daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran yang tersedia. 2. Kurangnya data yang memadai. 3. Adanya pesaing industri serta peran dan partisipasi pihak swasta yang belum optimal
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan pengrajin yang secara otodidak. 2. Adanya fasilitasi dari pemerintah, sehingga apabila dikembangkan akan dapat membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta menambah pendapatan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan konsumen terhadap produk UKM 2. Sudah adanya koordinasi antar dinas / instansi dalam pelaksanaan program kegiatan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang diteliti pada bab sebelumnya, maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1) **Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto**

Potensi usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto mempunyai peluang untuk dilestarikan dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh tersedianya para pengrajin dan pengusaha yang memiliki ketrampilan secara autodidak serta adanya warisan seni budaya secara turun temurun. Dengan menggunakan modal kerja yang dimilikinya, para pengusaha mampu melakukan kegiatan dengan hasil produksi usaha industri yang memiliki keunikan tersendiri. Adapun pemasaran usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto selain pada tingkat lokal dan regional, juga ada yang menembus sampai ke luar negeri.

2) **Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Melihat potensi yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto lebih berpusat kepada manusia, maka strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengembangkan adalah melalui strategi pemberdayaan, yaitu dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan penguatan potensi yang dimiliki para pengusaha dan pengrajin. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan UKM di Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Adapun program-program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif adalah melalui peningkatan aksesibilitas terhadap permodalan / pendanaan, penyediaan layanan infrastruktur, kemudahan dalam layanan perijinan, serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan. Sedangkan program dan kegiatan untuk penguatan potensi yang dimiliki melalui pembinaan dan pengembangan teknik dan manajerial yang meliputi pembinaan dan pengembangan teknik produksi, pemasaran serta sumber daya manusia.

3) **Faktor – Faktor Penghambat dan Pendukung**

Faktor – faktor penghambat dibedakan dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Faktor – faktor penghambat internal dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto adalah kultur masyarakat yang masih tertutup, rendahnya kemampuan manajerial serta keterbatasan bahan baku dan faktor – faktor penghambat eksternal adalah masih terbatasnya anggaran yang tersedia, keterbatasan data yang tersedia, adanya pesaing dari luar daerah, serta kurangnya peran dan partisipasi dari pihak swasta. Sedangkan faktor pendukung internal adalah adanya ketrampilan yang dimiliki oleh para pengusaha maupun pengrajin, dan faktor eksternal adalah adanya peluang dan adanya kebutuhan konsumen terhadap produk – produk UKM tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut :

- 1) Guna mempercepat proses pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi permasalahan bahan baku dan permodalan, maka pemerintah perlu untuk memfasilitasi dan mendorong terbentuknya kemitraan antara pihak swasta / pengusaha besar dengan pengusaha kecil yang belum berdaya, terutama dalam penyediaan bahan baku dan permodalan, termasuk koperasi yang sudah terbentuk perannya juga lebih diaktifkan dalam penyediaan permodalan, selain itu untuk menyediakan stok bahan baku industri / kerajinan, maka sentra yang ada di Kabupaten Mojokerto juga difungsikan sebagai penyedia stok bahan baku. Sedangkan untuk pembinaan kemampuan teknik dan manajerial, tidak hanya sebatas kemampuan teknik produksi, kewirausahaan dan pemasaran saja, tetapi minat dan ketrampilan juga termasuk bagi generasi muda dan calon – calon pengusaha maupun pengrajin yang sekarang ini masih belum nampak. Untuk itu perlu adanya upaya motivasi dan penyelenggaraan pelatihan, sistem magang maupun kursus – kursus yang tidak hanya melibatkan para pengusaha saja, tetapi Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga dilibatkan sehingga ada upaya yang terpadu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sedangkan untuk sosialisasi perijinan hendaknya lebih diperluas, tidak hanya sebatas pada perijinan usaha saja, namun juga ijin pendaftaran hak paten untuk melindungi hak cipta dari para pengusaha. Sedangkan dalam penyediaan layanan infrastruktur perlu adanya upaya perhatian pemerintah dalam perbaikan jalan di lokasi usaha yang belum memadai serta adanya transportasi umum yang melintasi lokasi usaha untuk kelancaran transportasi dan pemasaran UKM yang tersebar di tiap – tiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
- 2) Upaya untuk memberdayakan UKM melalui fasilitasi forum dialog / diskusi antara pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan kegiatannya perlu untuk dioptimalkan sehingga yang terlihat dan berperan aktif dalam pemberdayaan UKM tidak saja pemerintah dan masyarakat pengusaha saja, tetapi pihak swasta maupun LSM juga berperan serta secara aktif sesuai dengan profesinya masing-masing.
- 3) Dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk pemberdayaan dan pengembangan UKM hendaknya diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga dalam implementasi program dan kegiatannya tidak bersifat insidental dan lebih berkesinambungan serta ada keseimbangan antara berbagai aspek serta sasarannya lebih luas. Oleh sebab itu untuk mengatasi faktor penghambat keterbatasan anggaran yang ada kaitannya dengan faktor politis, yaitu para anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang lebih mengutamakan kepentingan konstituennya daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Mojokerto (pihak eksekutif) harus melakukan pemetaan perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sehingga anggaran yang tersedia dapat diketahui secara menyeluruh serta melakukan pendekatan – pendekatan dengan pihak DPRD, yang dilakukan sebelum pembahasan RAPBD antara legislative dan eksekutif. Sehingga dapat tercapai titik temu antara eksekutif dan legislatif dan program serta kegiatan yang diusulkan oleh pihak eksekutif dapat diterima pihak legislatif.
- 4) Untuk mencairkan kultur masyarakat yang masih tertutup, dan image masyarakat yang kurang cepat tanggap terhadap hal – hal yang baru dan mengikuti kelompok usaha bersama, maka pendekatan personil tersebut perlu dilakukan dengan memotivasi dan mendorong serta menyadarkan masyarakat pengusaha / pengrajin. Dalam hal ini tenaga pendamping maupun Pembina dan penyuluh di lapangan hendaknya lebih diaktifkan dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya.
- 5) Untuk mengatasi faktor penghambat berupa kurangnya data mengenai kondisi dan potensi dari UKM, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto lebih mengaktifkan tenaga pendamping dan penyuluh di lapangan untuk mengadakan pendataan di lapangan. Tentunya dalam melaksanakan pendataan disertai dengan persuasi, dorongan dan motivasi agar ada kesadaran dari masyarakat pengusaha UKM untuk memberikan data yang memudahkan pemerintah dalam melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan serta sasaran yang dituju.
- 6) Untuk mengatasi persaingan dengan pengusaha UKM dari daerah lain, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto hendaknya memfasilitasi dengan analisa dan pengamatan pasar serta melakukan pembinaan dan pengembangan untuk peningkatan daya saing produk, sehingga produk usaha UKM Kabupaten Mojokerto tetap mempunyai keunggulan tersendiri dan mempertahankan nilai – nilai khas daerah.
- 7) Dalam hal peningkatan akses kerjasama dan kelembagaan, sebaiknya pemerintah setempat lebih memberdayakan para pengusaha UKM yang ada. Sehingga akan tercipta kondisi saling menguntungkan dari pengusaha yang menjadi mitra UKM di satu pihak. Adanya perlindungan hukum terhadap UKM dalam proses kemitraan ini sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Milles, B.M dan Huberman, A.M. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Prawira
- Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan :**
Undang – Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah